

KYAI, PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN

Hasanatul Jannah

Penyuluh Agama Kementerian Agama Pamekasan

Email: h4s.jannah@gmail.com

ABSTRACT

Study about kyai with his role is always interesting and actual to analyzed. Kyai is a figure who is good in his words and behavior and become a guidance for the peoples. Kyai could not be separated with religion knowledge that is attached to him, so that the people always discuss religious issues to him. There is a polarization thoughts about kyai recently, so it make various typology of kyai. Kyai ought to be played a role as protector in religious life, so it can be better if kyai avoid political activities, so he would not be trapped in multiple roles. However, there is no reason for kyai to left political activities, because it is a part of religious life. When kyai choose politics, then the relationship to the community will begin to fade away, this is an antithesis just because politics are full of hurly-burly and full of intrigue, the religious community were full loyalty. How should kyai do his religious mission in a social agitation change?, and how does he wrapped the clash with sovereignty politics?.

Keywords: *Kyai, social change, political dynamics power*

ABSTRAK:

Kajian tentang sosok kyai beserta perannya selalu menarik dan aktual untuk dianalisis. Kyai menurut pandangan masyarakat adalah sosok yang dijadikan panutan baik dalam perkataan maupun perilakunya. Sosok kyai sendiri tidak lepas dengan pengetahuan agama yang sangat melekat pada dirinya, sehingga masyarakat selalu mendiskusikan permasalahan keagamaan kepada kyai. Belakangan ini terjadi polarisasi pemikiran tentang sosok kyai, sehingga memunculkan tipologi kyai yang cukup variatif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama, sehingga akan lebih baik jika kyai menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, sehingga tidak terjebak pada peran ganda. Namun ada juga sebaliknya, bahwa tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri. Namun, seringkali ketika kyai memilih politik, maka jarak kepada masyarakat akan mulai memudar, hal ini disebabkan dunia politik yang penuh dengan hiruk pikuk dan penuh dengan intrik, dimana sangat bertolak belakang dengan kehidupan kyai saat di tengah masyarakatnya yang penuh kesetiaan dan apa adanya. Lalu bagaimana seharusnya kyai menjalankan misi keagamaannya ditengah-tengah pergolakan perubahan sosial yang tidak terbendung saat ini?, dan bagaimana pula benturan politik kekuasaan dikemasnya?.

Kata kunci: *Kyai, Perubahan sosial, Dinamika politik kekuasaan.*

Pendahuluan

Sosok kyai bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagamaan masyarakatnya. Kyai tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluhan kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di desa biasanya kyai diminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memisahkan waktu

untuk memulai suatu pekerjaan. Tapi ada juga sebagai asumsi, bahwa penyebutan kyai cenderung disandarkan pada dunia pesantren yang berbasis tradisional dan NU.

Karena kemampuan agamanya yang cukup tinggi, maka kyai ditempatkan sebagai sosok “guru” baik dalam ilmu bathin (*esoteric*) maupun ilmu zhahir (*eksoterik*). Jika dilihat dari sejarahnya, bahwa gelar kyai memang tidak mudah untuk didapat. Dalam bahasa jawa gelar kyai memiliki asal usul dalam tiga jenis yang berbeda. *Pertama*: kyai merupakan gelar kehormatan bagi sesuatu yang dianggap keramat, *kedua*: gelar kehormatan untuk orang yang sudah tua, *ketiga*: gelar untuk seorang yang ahli agama Islam/memiliki pesantren dan mengajar kitab klasik.¹ Meskipun dalam perkembangan selanjutnya gelar kyai mulai melebar dan dapat dimiliki siapapun selama masyarakat setempat mau mengakuinya dan sang kyai bisa memenuhi kriteria sebagai sosok kyai apalagi mampu menjangkau apa yang tak terjangkau oleh orang awam.

Kedudukan sosial kyai dianggap cukup tinggi, sehingga kyai termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, kyai berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat. Suzanne Keller memosisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal: *pertama*, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, *kedua*, sebagai pendukung kekuasaan moral, dan *ketiga*, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat.² Maka seorang tokoh dituntut untuk berhasil dalam mengembangkan suatu citra umum yang memudahkan hubungan timbal balik yang bersifat simbolis antara tokoh agama dengan masyarakat. Tokoh agama dapat juga ditempatkan sebagai kolektif model dan cermin dari ambisi, harapan dan pergolakan masyarakat.

¹ Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.

² Suzanne Killer, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995), hlm. 213.

Kajian dan penelitian tentang sosok dan peran kyai telah banyak dilakukan oleh para peneliti, seperti: Hiroko Horikosi (1978) yang membedakan kyai dengan ulama dan memandang kyai sebagai agen perubahan sosial, sehingga kyai banyak bermain pada tataran kultural. Pada akhirnya kyai ditempatkan sebagai pemelihara sistem, bukan pencipta sistem dan kyai sebagai perantara (*broker*) dalam menghubungkan masyarakat modern dengan pertahanan sistem pertahanan tradisional. Maka Horikoshi memandang bahwa kyai menjadi tolak ukur dalam menunjukkan kewaspadaan terhadap prinsip otoritas, sehingga bila terjadi sebuah kemerosotan dalam hal apapun maka kyailah yang menjadi penentram³. Sementara Geertz (1960) menyoroti kyai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*), demikian juga Martin Van Bruinessen (1995) yang menggandengkan kiprah kyai dalam dunia tarekat (persaudaraan mistik Islam). Zamakhsyari Dhofier (1982) juga mengkaji tentang pandangan hidup kyai dalam tradisi pesantren. Dan masih banyak lagi belakangan bermunculan kajian dan penelitian seputar kiprah kyai terutama dalam pentas politik maupun sosial keagamaan.

Peran dominan kyai dalam proses perkembangan keagamaan tersebut kemudian membentuk sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur yang tidak terpisahkan, saling mengandaikan, saling membutuhkan dan membangun suatu keseluruhan sehingga sampai pada keseimbangan yang cenderung untuk mempertahankan diri. Maka analisa teori fungsional Parson sangat relevan dengan menggunakan konsep relasional atau peranan, sebagaimana diuraikan oleh K. J. Veeger yang mengkaji teori fungsionalisme Talcot Parson dengan mengintrodusir ke dalam dua ciri khas, yaitu:

1. Konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan system social.
2. Konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial.⁴

³ Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 242.

⁴ K. J. Veeger, *Realitas Sosial :Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 202.

Maka dalam analisis Sosiologis, menurut Weber (1968) sebagai kacamata fakta sosial, kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada personal leadership. Dalam konteks ini kyai adalah *patron* bagi umatnya (*client*) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Kompetensi Kyai dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Kyai senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Bahkan dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, Kyai mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Pemetaan Kyai Dalam Perubahan Sosial

Kyai dengan segala eksistensinya telah terjadi banyak pengembangan, bahkan pergeseran peran, baik dalam fungsi, tanggung jawab, kiprahnya, juga pada mindsetnya. Pada dasarnya kiprah kyai tidak hanya dilihat dari kegairahannya dalam mentransformasi nilai-nilai agama pada masyarakat, juga pada gigihnya dalam perjuangan social politiknya saja. Melihat sosok kyai, maka yang ada dalam benak kita adalah: *Pertama*, sebagai pendiri/pengasuh pondok pesantren, bahwa pesantren dapat dikatakan menjadi aspek yang hampir selalu ada dalam perkembangan masyarakat terutama yang menyangkut pengaruh kyai.⁵ Kyai pesantren adalah mereka yang aktifitas kesehariannya mengajar ilmu-ilmu agama didalam pesantren, baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal dan program-program pesantren lainnya. *Kedua*, sebagai guru tarekat, sebagai pemimpin kelompok pengajian. *Ketiga*, sebagai pembela ummat, sebagai da'i, dan lain-lain.

Dalam konteks kyai sebagai da'i, kyai menjadi sosok sumber inspirasi bagi ummatnya, sehingga dalam totalitas seorang da'i harus profesional. Profesionalisme merupakan aspek penting dalam menampakkan kualitasnya. Seorang da'i awalnya muncul dari kalangan kyai dan santri, namun saat ini ada kecenderungan dikalangan masyarakat umum bahwa profesi ini lebih terbuka,

⁵ Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 203.

artinya walau bukan kyai ada peluang untuk menjadi seorang da'i.⁶

Kyai sekilas tampak homogen, jika dilihat secara seksama ternyata amat variatif. Perbedaan itu diakibatkan oleh banyak faktor. Misalnya, dari perbedaan mereka dalam mempersepsi dan memahami ajaran agama itu sendiri, lingkungan di mana masing-masing Kyai itu hidup dan dibesarkan, kondisi ekonomi, dan juga faktor sosial politik. Muncul dan berkembangnya berbagai aliran keagamaan di berbagai tempat adalah bukti bahwa selalu adanya perbedaan pemahaman, persepsi atau sudut pandang. Di kalangan kyai misalnya, muncul istilah kyai fikih, kyai tasawuf dan sebagainya.

Berangkat dari asumsi tersebut, kemudian melahirkan peta konsep tentang perkyaian, di mana kyai terpetakan dalam dua definisi, yakni: kyai karena "keturunan dan kyai karir". kyai karena keturunan sebagaimana diungkapkan diatas merupakan sosok kyai yang secara genitis memang keturunan kyai besar baik ditingkat desa maupun dalam skala yang lebih besar, biasanya kyai keturunan sudah dipersiapkan sejak kecil, sehingga orientasi keilmuannya dari awal sudah diarahkan untuk menguatkan posisinya kelak ketika sudah siap menjadi kyai. Hal ini dibangun agar masyarakat tidak kecewa ketika kyai tersebut telah tiada maka keturunannya telah siap dengan segala predikat kyai yang akan disandangnya. Kemudian kyai karir, secara genitis bukan keturunan kyai, namun karena memiliki ilmu agama yang cukup mapan dan dipupuk dengan bakat yang dimilikinya, maka dengan mudah ia memposisikan dirinya sebagai kyai.

Saat ini kyai karir ini banyak diminati oleh masyarakat, sehingga ada ungkapan yang cukup menarik dari sebagian masyarakat, bahwa untuk menjadi kyai cukup mudah yang penting punya pengetahuan agama, punya mushalla dan bisa ngajar ngaji. Peran keagamaan kyai di Indonesia cukup kompleks, yakni: *pertama*, sebagai pemimpin ritual keagamaan. Peran ini berangkat dari ketinggian tingkat relegiusitas masyarakat karena

⁶ Ahmad Sarbini, *Kajian Dakwah Mutiperspektif, Teori, Metodologi, Problem dan Aplikasi* (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm. 64.

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pelaksanaan ritual keagamaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat lebih melihat pada fungsi agama sebagai ikatan solidaritas yang memberikan ikatan simbolik. *Kedua*, sebagai pendiri atau pengasuh pondok pesantren, penggambarannya adalah banyak berdirinya pesantren yang tersebar disetiap pelosok di Indonesia, baik pesantren kecil maupun pesantren besar. Disadari ataupun tidak, ketika seseorang memutuskan memilih pondok pesantren, maka yang jadi pertimbangan pertama adalah kyai yang mengasuh pesantren tersebut. Konsep kepemimpinan dalam pesantren adalah konsep mata rantai yang terus bersambung, artinya konsep tersebut menganggap sebagai sebuah aspek integral dalam kepranataan spiritual. Untuk itu santri akan sangat menjunjung tinggi berkah dari kyai.⁷ *Ketiga*, sebagai guru/pemimpin tarekat, para pemimpin tarekat merupakan kyai yang memiliki pengaruh besar dan memiliki jamaah cukup banyak.

Perkembangan selanjutnya, ketika bermunculan asumsi dari sebagian masyarakat yang mulai berani mengkritisi sosok kyai, bahwa kyai dahulu sangat berbeda dengan kyai sekarang. Dulu, masyarakat tidak akan berani melontarkan kalimat kritik, karena dianggap sangat tidak sopan. Namun saat ini ungkapan tersebut bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilontarkan. Fenomena tentang keberanian ini menjadi layak dipertanyakan, apakah memang benar-benar telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sosok kyai atau dari masyarakatnya yang sudah mampu berfikir kritis tentang perkembangan kondisi sosialnya?. Di samping itu faktor perubahan sosial secara signifikan sangat

⁷ Jika pesantren ditempatkan sebagai lembaga kekuasaan, maka strategi perubahan dalam pesantren merupakan jaringan kelompok dan individu yang saling terkait dalam hubungan atas bawah, yakni kyai dan santri. Karena itu setiap upaya melaksanakan perubahan perlu memobilisasi dan memanipulasi kekuasaan terhadap orang lain. Strategi kekuasaan merupakan rencana untuk mengiring perubahan yang mengakui fakta mendasar dalam kehidupan sosial. Maka hal ini menjadi strategi kekuasaan versus sikap, terutama sikap-sikap yang terjadi dalam keseharian. Baca: Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hlm. 496.

berdampak cukup kritis dalam melahirkan persepsi yang berbeda dari sebelumnya, dimana studi tentang perubahan sosial akan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya. Dimensi ini mencakup pula konteks historis yang terjadi pada wilayah tersebut, sedangkan dimensi waktu meliputi konteks masa lalu (*past*), sekarang (*present*) dan masa depan (*future*).⁸

Kemudian jika dianalisa lebih jauh maka akan muncul pertanyaan yang paling mendasar, dimanakah letak perbedaan tersebut? Bila akhirnya faktor keterlibatan kyai dalam dunia politik dianggap biangnya, bukankah kyai berpolitik bahkan terlibat dalam politik praktik itu sejak masa sebelum kemerdekaan telah banyak mewarnai percaturan dunia politik. Dalam konstelasi sejarah di Indonesia, kyai telah banyak melakukan pergerakan bahkan perjuangan, salah satunya melalui peran politiknya dengan mengusung berbagai partai-partai Islam. Namun persoalannya jika dulu kyai berpolitik karena memiliki musuh bersama dan juga musuhnya cukup jelas yakni kolonialisme, kemudian berlanjut pada masa orde baru. Maka saat ini perjuangan kyai yang dihadapi bukan lagi musuh bersama ataupun musuh yang jelas. Kyai dihadapkan pada dunia kapitalisme dan modernisme, yang sebagian kecil kyai menjadi bagian dari itu semua. Budaya tersebut cenderung menjadikan masyarakat menjadi individualistik karena mengagungkan teknologi dan rasionalitas, padahal tindakannya berada level irasional.

Demikian juga kapitalisme, karena ulahnya seringkali menghilangkan nilai-nilai solidaritas sosial yang sejak dulu telah tertanam dalam dalam masyarakat. Akhirnya, karena masing-masing individu sibuk mengurus diri sendiri maka semangat solidaritas menjadi terkikis. Arus modernisasi ini kemudian dibendung oleh tokoh-tokoh posmodernisme, sehingga melahirkan teori-teori posmodernisme, seperti: Antony Giddens, Foucault, Boudrillard dan lain-lain. Mereka mencoba menelanjangi

⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 3.

fenomena masyarakat modern, sehingga studi posmodernisme cenderung dilihat sebagai studi yang bersifat reflektif. Boudrillard menilai bahwa masyarakat modern menjadi terjerumus pada masyarakat konsumtif. Masyarakat konsumtif memiliki kebutuhan-kebutuhan yang membawanya menuju pada objek yang memberinya kepuasan, walaupun pada akhirnya manusia tersebut tidak pernah merasa puas.⁹ Manusia modern lebih tertarik untuk membeli merk, bukan dari nilai dan kemanfaatannya. Semuanya diarahkan pada konsep penyeragaman karena faktor gaya hidup dan citra yang diarahkan oleh iklan. Terjadinya perubahan sosial masyarakat disebabkan proses berlangsungnya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang diikuti oleh berbagai implikasi di bidang ekonomi, geografis, budaya, dan psikologisnya, baik secara individu maupun kelompok. Kiprah seorang kyai kemudian mau tidak mau harus terbentur dengan budaya masyarakat hedonis tersebut. Perjuangan kyai dituntut untuk lebih fleksibel dan akomodatif, namun juga diperlukan strategi dinamis agar dakwah agamanya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Secara historis, kyai menjadi bagian sosok agamawan yang posisinya cukup dipentingkan dalam konteks berbagai pertimbangan-pertimbangan menyangkut kebijakan, apalagi kebijakan yang melibatkan masyarakat, terutama bila berhubungan dengan kebutuhan gerakan-gerakan maupun mobilisasi. Maka kyai dinilai dan ditempatkan sebagai penentu maju dan tidaknya sebuah peradaban. Oleh sebab itu, kemajuan selalu identik dengan perubahan, kemudian muncul tudingan apakah kyainya terlebih dahulu yang harus berubah ataukah masyarakatnya. Tudingan tersebut kemudian ditempatkan dalam berbagai kepentingan ketika kyai selalu ditempatkan sebagai penjaga tradisi yang harus stagnan dan tidak dinamis, sehingga benturan-benturan perubahan sosial harus dihadapi atas nama agama. Atau sebaliknya, kyailah yang harus berada di garda paling depan untuk menyesuaikan dengan berbagai pergolakan perubahan akibat tuntutan zaman.

⁹ Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 74.

Posisi tersebut menjadikan kyai berada dalam kondisi yang cukup dilematis. Zamakhsyari Dhofier menjembatani dilema tersebut, bahwa kyai memandang tradisi dan modernitas sebagai dua entitas yang perlu bersatu untuk kebutuhan umat Islam menuju masa depannya, dengan berpegang pada azas '*al muhafadhoh 'alal qadimil ashlah wal ahdzu min jadidin nafi*' (menjaga tradisi lama yang lebih baik dan menambah ilmu pengetahuan yang baru yang bermanfaat).¹⁰ Hal tersebut berarti seorang kyai dituntut untuk memiliki strategi dakwah yang bijak, konsisten dan mampu merespon perkembangan zaman akibat perubahan sosial.

Modernisasi menjadi hal yang tidak terbantahkan dengan beberapa fakta yang telah ada di Indonesia. Fenomena ini menjadi babak tersendiri bagi para kyai, ketika kyai hanya diidentikkan sebagai pemangku masjid dan madrasah, pengajar dan pendidik, serta ahli dan penguasa hukum Islam, maka kemudian harus berhadapan dengan beragamnya pemahaman baru yang merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Kyai dituntut untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam menyampaikan nilai-nilai agama sehingga tidak terjebak dalam kebakuan tradisi dan tidak terhanyut dalam arus modernisasi.

Pengkulturan dan Benturan Peran Ganda Kyai

Sebagai pusat dakwah, kyai cukup memiliki banyak andil dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah sejak zaman kolonial belanda hingga saat ini. Demikian halnya dengan peradaban Indonesia modern, bahwa ujung tombak pembangunan peradaban melayu nusantara terdapat pada eksistensi kyai itu sendiri.

Kyai menjadi aktor utama dari segala konsepsi sosial agamanya sekaligus menjadi institusi yang menjadi penyebarannya, sehingga kyai memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa kyai beserta pengaruh di dalamnya menjadi pembentuk sistem dalam

¹⁰ Zamakhsyari Dhofierbnbb, *Tradisi Pesantren*, hlm. 270.

pola kehidupan masyarakatnya, selain itu juga dapat menjadi penentu budaya.

Penghormatan dan pengagungan terhadap kyai merupakan tradisi yang diwarisi oleh masyarakat tradisional, sehingga kemudian muncul pembelaan-pembelaan yang luar biasa dari masyarakat terutama santri terhadap pengamanan sang kyai.¹¹ Sikap heroik tersebut sebagai bentuk bakti, khidmat dan loyalitas yang tinggi terhadap sang kyai.

Saat ini kyai tidak hanya dominan dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat, namun juga terlibat dalam politik dan birokrasi. Peran ganda ini seringkali berpengaruh besar terhadap manajemen waktu, tenaga bahkan dalam pemikiran kyai, sehingga baik kyai maupun masyarakat yang tidak siap akan mengalami keterkejutan dalam hal pemahaman kondisi sosialnya. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah: Bagaimana pergeseran peran kyai tersebut berlangsung sehingga melandasi motivasi kyai dalam pilihan peran gandanya?, Bagaimana para kyai yang terlibat peran ganda tersebut menjalankan fungsi sosialnya ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks? Dan Bagaimana masyarakat menempatkan sosok kyai yang menjalankan peran ganda dalam sosial kultural masyarakat yang juga mengalami perkembangan dalam berbagai sektor?

Kehadiran Kyai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *moral force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain adapula sebagian masyarakat yang mengaharapkan peran kyai atau elit agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia.

Sebagian kyai punya peran ganda sejak dulu itu sudah ada, lalu apakah saat ini peran ganda tersebut kemudian menjadi persoalan?. Namun jika simbol kyai yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat

¹¹ Ali Usman, *Kyai Mengaji Santri Acungkan Jempol* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 51.

dalam permainan politik dan kekuasaan itu menjadi persoalan, maka dalam politik kyai akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya realitas ini juga terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, kyai punya peran penting dalam perlawanan penjajahan terutama dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga kyai menjadi simbol solidaritas perjuangan ummat. Maka dalam konstelasi sejarah di Indonesia dapat dipahami bahwa kyai dengan social politiknya tidak dapat dipisahkan secara ekstrem. Namun bagaimana manuver politik kyai saat ini? Apakah muatannya beriringan dengan perjuangan sebelumnya? Hal ini berlaku juga dalam percaturan perkyaian di Indonesia, di mana adanya rekonstruksi politik telah menggeser garis perjuangan kyai seiring dengan perubahan dan perkembangan politik tanah air. Kyai pun mulai merambah wilayah politik dengan segala manuver politik dukung- mendukung (*legitimasi*) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturahmi. Proses ini karena adanya *simbiosis mutualisme* untuk *interest* tertentu demi mendapatkan bagian dari kekuasaan atau minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung. Sementara elit politik akan mendapatkan legitimasi moral keagamaan dari kyai.

Namun bagaimanapun juga, para kyai telah melestarikan dirinya bukan saja sebagai pemimpin non formal, tetapi sebagai institusi yang kritis terhadap kekuasaan yang ada, dan fungsi kritis tersebut akan tetap bertahan jika kyai tidak masuk dalam ranah kekuasaan formal birokrasi. Agama dan kyai menjadi institusi sosial yang mampu mengikat dalam sistem simbol kebersamaan dan membantu menumbuhkan kembangkan rasa solidaritas, sehingga agama menjadi landasan dalam melakukan gerakan-gerakan sosial. Kepercayaan terhadap kyai dibandingkan pada pemimpin lainnya menurut Bouwsma (1998) dipandang bahwa orientasi penduduk pedesaan adalah kyai, bukan pada kepemimpinan birokrasi. Hal itu karena kyai memiliki kharisma tersendiri yang hampir tidak dimiliki oleh kepemimpinan yang lainnya.

Taufik Abdullah¹² menganalisis tesis Weber, bahwa Islam memiliki keistimewaan keabsahan dari kebenaran dogma yang ditentukan oleh konsensus para ulama sebagai tokoh agama. Maka Islam merupakan agama yang oleh kelompok status tertentu, seperti dalam perang agama, di mana bagi sebagian para prajurit adalah untuk mendapatkan *ghanimah*. Karena itulah kelas sosial dalam Islam berorientasi pada kepentingan feodal, artinya ada jaringan sosial antara patron dan klien, maka muncullah prestise sosial.

Jadi, Weber beranggapan bahwa struktur patrimonial yang berlandaskan kharisma penguasa adalah faktor utama dari sistem budaya agama Islam, sehingga diperlukan penguasa kharismatik dan keramat untuk menjadi pemimpin atau penguasa. Sedangkan penguasa yang bercorak tersebut harus pintar menjaga kehormatan dan kepercayaan umatnya.

Ketika seorang kyai terlibat dalam politik kekuasaan, maka akhirnya muncul juga sebutan kiai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat punya penilaian tersendiri tentang sosok kyai dengan segala perannya, atau juga untuk membedakan antara kyai yang terlibat politik dengan yang tidak terlibat. Disadari atau tidak, bahwa keterlibatan kyai dalam dunia politik menyebabkan semakin mudarnya kharisma seorang kiai di mata umatnya. Ekses negatif ini tentunya dirasakan oleh kiai yang terlibat dalam perpolitikan, akan tetapi hampir seluruh kiai menerima imbasnya. Para kiai yang tidak berpolitik pun merasakan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dan tertanam sangat kuat. Namun ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menilai positif keterlibatan kyai dalam dunia politik, mereka berasumsi bahwa masuknya kyai dalam percaturan politik diharapkan dapat menekan berbagai penyelewengan kekuasaan dan lebih mempermudah menjembatani persoalan-persoalan umat. Sebaliknya, peran ganda kyai dalam dunia politik dinilai telah menyalahi koridor dan filosofi masyarakat. Bagi sebagian kyai yang masuk dalam ranah politik, bahwa keterlibatannya bukan tanpa alasan, karena faktor historis cukup kuat untuk seorang kyai untuk harus terlibat dalam politik, bagi

¹² Taufik Abdullah (Ed), *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 19.

mereka Nabi Muhammad SAW adalah sosok negarawan sebagai kepala Negara, dimana dalam tugas sucinya adalah sebagai pembawa risalah. Demikian juga Keterlibatan kyai dalam pentas politik di Indonesia sejak, dimana sejak zaman Kesultanan Mataram dan pada masa penjajahan Belanda, kyai mempunyai peranan penting dalam perjuangan Hizbullah dan Sabilillah dimana pesantren menjadi tempat pelatihan para pejuang. Demikian juga dalam perjuangan kemerdekaan, para kyai banyak terlibat memperjuangkan meraih kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut berarti, secara ideologis ajaran Islam melingkupi tidak hanya pada aspek ritual dan moral saja, tetapi juga pada nilai-nilai semua sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik.

Semestinya Kyai sah-sah saja berpolitik, namun tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan menanamkan nilai-nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*.

Kyai mengemban amanah kekuatan kultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara *etis-profetik* mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran kyai akan tetap membumi di masyarakat. Pada akhirnya, moralitas kyai tidak menjadi sekedar bahasa *isoterik* belaka, tetapi dapat menjadi bahasa dan perjuangan politik demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian bagi umat. Walaupun pada akhirnya pembangunan, industrialisasi dan modernisasi dijadikan alasan keterlibatan berbagai elemen termasuk di dalamnya peran kyai, namun menjaga tradisi dan nilai-nilai

hidup harus tetap menjadi program yang beriringan, agar tidak mengakibatkan eksese negatif yang harus diterima masyarakat. Sebagaimana digaungkan Sunyoto Usman, bahwa semestinya gerakan keagamaan berorientasi pada pemeliharaan tradisi lokal dengan berpegang pada proses internalisasi ajaran agama dengan tidak harus menghancurkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam kultur lokal, agar tidak terjadi kebangkitan resistensi pada ajaran agama yang diintroduksi.¹³

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Arkoun¹⁴ memberikan perbedaan yang jelas antara wewenang dan kekuasaan dalam Islam. Wewenang muncul dalam hubungan pribadi tanpa ada kendala fisik atau hukum. Wewenang merupakan keterikatan sementara seorang individu atau kelompok pada kata-kata dan tingkah laku seorang individu lain yang membawahkan dirinya sendiri terhadap tujuan-tujuan mereka yang mengikutinya. Seperti, kehadiran Nabi Muhammad sebagai yang berwenang dalam agama, maka beliau menjadi pemimpin ummatnya. Sedangkan kekuasaan berada diluar yang dikuasai, bergantung pada tempatnya bertopang, apakah pada wewenang atau pada kendala. Kekuasaan menimbulkan persatuan dan ketaklukan bagi mereka yang ditundukkan. Maka kyai sebagai tokoh agama ditempatkan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, dimana mereka memiliki kekuasaan untuk menilai, memutuskan sejauh batas melakukannya atas nama tatanan. Hal ini merupakan gabungan dari paksaan, pengaturan alam semesta wewenang dan daya.

Bagaimanapun juga, peran sosial politik kyai dalam

¹³ Sunyoto Usman, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 225.

¹⁴ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 210.

sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat industrialisasi saat ini, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kyai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dari tradisional ke modern.

Namun selama masih dalam kendali koridor keagamaan, dan juga selama kyai masih dapat menjaga ketokohnya, maka masyarakat juga masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kyai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Kyai masih ditempatkan sebagai sumber fatwa dan sumber inspirasi kebajikan ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kyai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya.

Jadi, untuk menempatkan seputar dilema tarik-menarik antara peran ganda kyai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, maka juga yang menjadi pertimbangan adalah sejarah kerangka teologis yang berakibat pada aksi sosial politik yang dihasilkannya. Maka jika ditelusuri lebih detail akan menghasilkan pemahaman, *pertama*: bahwa ada kecenderungan kyai akan terlibat dalam urusan politik untuk menempatkan urusan ummat dalam panggung politik praktis dengan asumsi, politik sebagai kendaraan paling praktis. Dalam hal ini biasanya kyai memahami betul konsekuensi yang ia terima, yakni berkurangnya peran sosial keagamaannya, sehingga ia mengantisipasi dengan menempatkan sanak keluarganya untuk menanganai peran tersebut, sehingga kyai bisa lebih fokus pada urusan politik, *kedua*: kyai yang memandang ringan dan lebih fleksibel pada urusan politik praktis, baginya politik hanyalah menjadi kepentingan sesaat dan menjadi batu loncatan dalam kepentingan pragmatis semata, *ketiga*: kyai yang konsisten untuk

tidak bersinggungan dengan urusan politik.

Adanya pemahaman yang melatarbelakangi klasifikasi peran kyai kemudian melahirkan konsekuensi logis terhadap persepsi masyarakat tentang sosok kyai. Menjamurnya partai-partai politik yang bernuansa agama juga tidak lepas dari asumsi masyarakatan tentang keseriusan kyai untuk lebih jauh terlibat dalam dunia politik. Maka tidak salah jika kemudian ada penggambaran masyarakat tentang sosok “kyai partai”.

Oleh karena itu, kajian tentang peran sosial dan politik kyai dalam perspektif historis-teologis menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat urgensi kedalaman tersebut akan menghasilkan pemetaan kyai yang lebih komprehensif. Kajian historis-teologis merupakan unsur yang sangat penting untuk mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan kerangka persepsi yang menjadi dasar pembentukan struktur kognisi yang dimilikinya.

Maka sudah semestinya sosok kyai muncul dari sebuah pengembangan kepribadian yang terbuka dan memiliki komitmen yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai elemen seorang tokoh agama, sehingga mampu melampaui batas-batas primordialisme namun tetap berdiri di atas kapasitas intelektualnya. Ada juga perubahan tertentu yang kadang salah dan dikaitkan dengan modernisasi. Hal tersebut disebabkan tidak semua modernisasi menjadi seperti semodern barat, itu karena pola modernisasi berbeda-beda. Tradisi dapat berubah tanpa modernisasi, demikian juga modernisasi dapat terjadi tanpa perubahan mendasar dalam tradisi. Unsur-unsur tradisi yang tertanam dalam ketokohan kyai dan kantong-kantong kebudayaan dapat dipertahankan dalam masyarakat modernisasi, karena unsure-unsur tradisional tersebut dapat menyediakan landasan yang kuat dalam memetakan modernisasi.

Simpulan

Masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai spiritualitas agama dan tradisi hidup, maka kekuasaan di tanah air ini tidak lepas dari tokoh agama yakni kyai. Kyai mempunyai tanggung jawab secara

horizontal ditingkat sosial masyarakatnya karena memiliki integritas moral yang *legitimate*. Proses legitimasi tersebut tidak datang begitu saja, tapi ditentukan oleh bagaimana kiprahnya dalam mengabdikan hidupnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Maka kiprah tersebut melahirkan “charisma”, di mana ketokohnya melebihi seorang tokoh dalam sektor formal. Namun tidak seharusnya kharisma tersebut menjadi luntur hanya karena sektor formal mengalahkan eksistensi sosok kyai.

Kemudian ketika eksistensi kyai dibenturkan dengan kondisi riil masyarakat saat ini yang dihadapkan dengan berbagai benturan modernisasi, globalisasi dan industrialisasi, seperti para elit agama perlu melakukan terobosan sehingga elemen masyarakat tidak mengalami “*shock culture*”. Ini menjadi pembelajaran yang cukup berarti ketika Negara Turki dan Mesir sebagai pusat intelektual Islam dianggap tidak mampu mengembangkan pemahaman baru terhadap hukum dan peradaban Islam melalui pendidikan yang representatif, akibatnya ketika negara tersebut menjadi modern, maka masyarakat Mesir jatuh pada pilihan yang pragmatis dengan mengadopsi tradisi-tradisi barat secara mentah.¹⁵ Demikian halnya dengan Turki dengan sekularisasi dan modernisasinya mengalami keterputusan kultural masa lalunya. Akibatnya Turki menjadi terjebak dalam dimensi masa lalu (*taklid*) dan dimensi masa depan (*ijtihad*), dalam arti mau bernostalgia dengan masa lalu tertutup oleh huruf dan bahasa, namun merengkuh dan berkompetisi dengan masa depan kalah bersaing dengan Eropa. Tidak halnya dengan Jepang walaupun negara tersebut canggih dalam industrialisasinya namun tetap sinergis dengan masa lalunya.

Karena kyai sebagai elit agama merupakan pemimpin *polymorphic*, di mana dalam kepemimpinannya membawahi bidang agama dan sosial, maka figurnya menjembatani masyarakat dalam membangun kapital sosial yang bernilai produktif dengan tetap berani menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan agama. Kyai sebagai tokoh agama ditempatkan

¹⁵ Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 99.

pada posisi sentral, hal ini menjadi ilustrasi tentang pandangan positif yang melekat padanya sebagai pengemban moral dan agama dengan sarana kelas kekuasaan yang selalu bertahan.

Akhirnya upaya untuk mengembalikan peran sosial-keagamaan kyai merupakan strategi sosial yang harus diupayakan, apalagi untuk membentengi masyarakat dengan nilai-nilai agama Islam akibat derasnya arus industrialisasi dan percepatan transformasi sosial. Kekuasaan kyai diorientasikan untuk menggalang perubahan sosial yang mampu memperkokoh posisi sosialnya masyarakat. Bagaimanapun juga, kyai tetap harus berada dan membela tradisi kultural dan agama, dan jika kehilangan kekuatannya akibat dari berbagai strategi-strategi politik maka otoritas kyai menjadi luntur. Kyai membangun kharisma dan kekuasaannya melalui proses yang tidak mudah diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari penggalan ilmu agama, manajemen sosial dan kepemimpinan, sampai pada ketahanan memelihara statusnya. Karenanya adanya kesadaran bahwa perjuangan kiai berangkat dari otoritas kultural dan agama menjadi penting untuk dipahami bersama, untuk itu orientasi perjuangannya juga harus diorientasikan dalam rangka transformasi sosial masyarakat dan bukan dalam pertarungan di medan politik yang seringkali menciptakan konflik dan disintegrasi sosial yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (Ed), *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIS, 1994.
- Baudrillard, Jean, *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi pesantren (edisi revisi)*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- , *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1990.
- Jonge, Huub de and Elli touwen Bouwsma, *Across Madura Strait: The Dinamic of an insular society*, Leiden: KITLV, 1995.
- Lauer, Robert H., *Perspektif tentang perubahan social*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Nahrawi, Amiruddin, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Sarbini, Ahmad, *Kajian Dakwah Mutiperspektif, Teori, Metodologi, Problem dan Aplikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Usman, Ali, *Kyai Mengaji Santri Acungkan Jempol*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Usman, Sunyoto, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Veeger, K. J., *Realitas Sosial :Refleksi Filsafat Atas Hubungan Individu Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.